

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan adalah masalah yang masih terus berkembang dan menjadi perhatian umat manusia. Sejak awal adanya ekonomi pasar, kemiskinan selalu menjadi masalah penting yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan memerangi kemiskinan adalah salah satu agenda paling penting dalam sejarah umat manusia (Lee M. , 2017).

Kemiskinan adalah salah satu masalah klasik yang akan selalu dihadapi oleh negara manapun, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mengupayakan pengentasan masalah kemiskinan melalui pembangunan nasional dengan cara meningkatkan kinerja perekonomian. Kesungguhan peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga patut untuk dikaji. Program pengentasan kemiskinan bisa ditelusuri dengan mengkaji sasaran penyebab kemiskinan seperti kebijakan mengatasi pengangguran, peningkatan dan pemerataan pendidikan, pembukaan lapangan pekerjaan serta kebijakan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah dan belanja daerah melalui APBD. Jika belum bisa menyembuhkan kemiskinan, paling tidak bisa mengurangi (Azwar & Subekan, 2016).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan masalah dimensi moneter kemiskinan seperti pendapatan atau pengeluaran, tapi juga berkaitan dengan masalah non-moneter seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Bahkan, tidak hanya faktor ekonomi

seperti pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan, faktor lain seperti politik, geografi, budaya dan sosial juga dapat turut andil dalam kemiskinan (Spaho, 2014).


Dalam studi ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu komponen yang dapat berpengaruh kuat dalam menurunkan angka kemiskinan. Dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah, maka meningkat juga produksi barang dan jasa dalam suatu daerah, juga membuka lapangan pekerjaan serta menambah pendapatan dan seharusnya menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, tidak akan berpengaruh banyak dalam menurunkan kemiskinan. Polarisasi pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan spasial antara satu daerah dengan daerah lain juga antar satu individu dengan individu lainnya (Lee & Sissons, 2016).

Perhatian pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat dilihat dari investasi pemerintah untuk bidang pendidikan. Pendidikan sebagai *human capital investment* akan berpengaruh terhadap kemungkinan seorang individu untuk keluar dari jerat kemiskinan. Klasifikasi pekerjaan yang semakin kompleks dan syarat administratif yang semakin tinggi, terbukti menghambat adanya peluang keluar dari jerat kemiskinan jika tidak dibarengi dengan investasi modal manusia. Pendidikan tidak akan mereduksi kemiskinan jika tidak dibarengi dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Alih-alih mereduksi, justru akan menambah tingkat kemiskinan (Lee M. , 2017).

Pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Menurunkan pengangguran merupakan salah satu prioritas penting bagi

seluruh negara. Pengangguran terjadi salah satunya karena adanya angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Pengangguran akan menyebabkan masalah kemiskinan karena ketidakadaan pekerjaan. Masalah lain timbul ketika pekerjaan yang didapat tidak dapat memenuhi standar kehidupan. Banyaknya rekrutmen dengan sistim *outsourcing* dan kultur masyarakat Indonesia yang agraris, menyebabkan sebagian masyarakat terjebak dalam status setengah menganggur (Amalia, 2012).

Menurut Prawoto (2008), program pengentasan kemiskinan sudah berlangsung lama di Indonesia. Namun, belum ada perubahan signifikan dalam pengentasan kemiskinan, termasuk dalam aspek kenaikan pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi justru *trade-off* dan hanya diserap oleh golongan masyarakat tertentu serta membuat jurang kesenjangan. Kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menekankan kepada pertumbuhan ekonomi harus bisa dipastikan diserap oleh seluruh lapisan masyarakat seperti tertuang dalam firman Allah pada Surat Ad-Dzariyaat ayat 19:


 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS 51:19).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang juga menemui batu terjal bernama kemiskinan. Sejak dari kemerdekaan, Indonesia selalu berusaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Indonesia memiliki tren positif dalam penurunan kemiskinan semenjak krisis moneter pada tahun 1998 yang menghantam Asia Tenggara. Walaupun banyak terjadi masalah politik dan

sosial, pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada dalam tren positif untuk mengurangi angka kemiskinan. Walaupun masih terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah timur dan wilayah barat karena sentralisasi pembangunan di masa orde baru (Whardana, 2010).

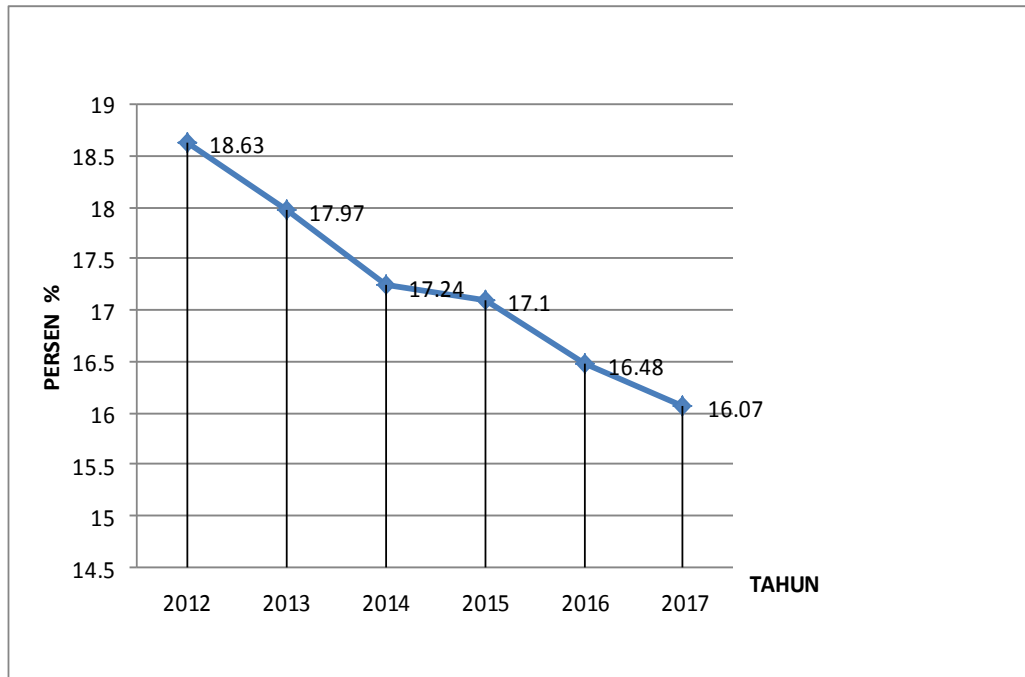
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau serta secara administratif memiliki 34 Provinsi. Salah satu Provinsi yang akan penulis teliti berdasarkan yang penulis uraikan diatas adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyumbang sebanyak 421 pulau dari 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat disahkan secara resmi pada 1958 melalui UU Nomor 64 tahun 1958.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012 – 2017

Tahun	Jumlah Penduduk
2012	4.587.562
2013	4.630.302
2014	4.773.795
2015	4.835.577
2016	4.896.162
2017	4.955.578

Sumber : BPS NTB (data diolah)

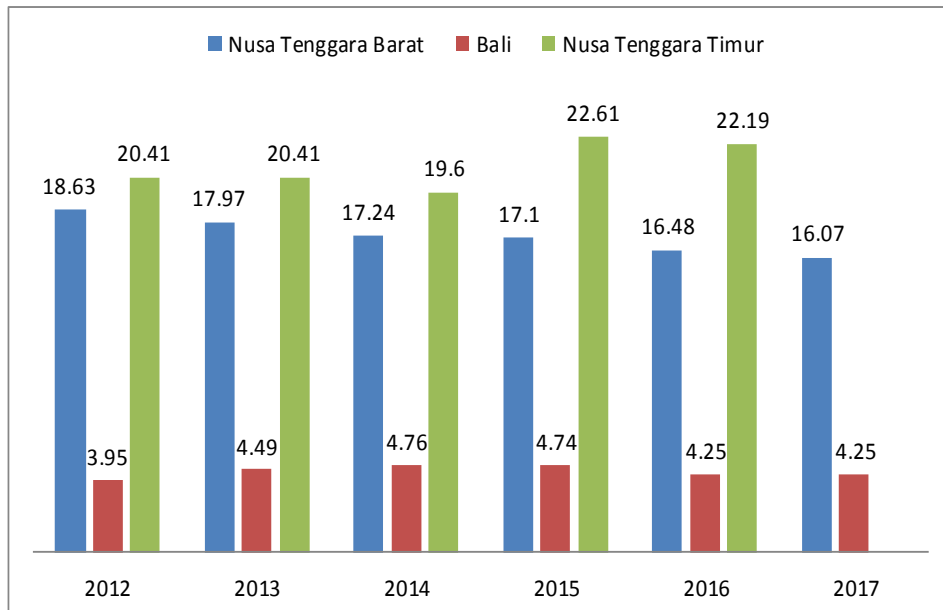
Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan jumlah penduduk dalam enam tahun terakhir. Dari data yang diolah dari BPS NTB pada Tabel 1.1, dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Walaupun tidak sampai menembus 6 juta penduduk dalam 6 tahun terakhir, jumlah penduduk NTB meningkat di kisaran ratusan ribu hingga puluhan ribu tiap tahunnya. Jumlah penduduk pada 2017 yaitu 4.955.578 dan pada 2012 yaitu 4.587.562 atau dari tahun 2012 ke 2017 dalam rentang 6 tahun terakhir meningkat sekitar 368.016 jiwa.



Sumber : BPS NTB (data diolah)

Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012-2017

Dilihat dari gambar tersebut, tingkat presentase kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2012 presentase kemiskinan terdata sebesar 18,63% yang lalu ditahun berikutnya turun menjadi 17,97%. Pada tahun 2014, turun sedikit menjadi 17,24% lalu menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 17,1%. Pada tahun 2016 presentasinya 16,48% dan ditahun 2017 menjadi 16,07%. Upaya pemerintah meski belum maksimal, dilihat dari grafik presentase kemiskinan menurun dari tahun ke tahun.



Sumber : BPS NTB, BPS BALI, BPS NTT (data diolah)

Gambar 1. 2 Perbandingan Presentase Angka Kemiskinan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2012 – 2017 (dalam persen)

Nusa Tenggara Barat secara teritorial berada pada gugusan pulau Sunda Kecil yang mencakup tiga Provinsi bersama Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dilihat dari presentase kemiskinan, provinsi dengan angka kemiskinan terkecil adalah Bali dengan selisih lebih dari 10 persen dengan Nusa Tenggara Barat dan Timur di setiap tahunnya. Dari gambar tersebut, tren penurunan angka kemiskinan hanya terjadi di Nusa Tenggara Barat. Angka kemiskinan terparah dan upaya yang sangat minim dari pemerintah berada pada provinsi Nusa Tenggara Timur. Padahal ketiga pulau memiliki keadaan geografis yang sama, namun secara luas dan jumlah kabupaten/kota yang berbeda.

Dalam studi ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Dua hal tersebut, merupakan hal yang saling

terkait dalam pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada naiknya produksi barang dan jasa yang akan menyerap banyak tenaga kerja untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk mengelola sumber-sumber daya secara efektif dan efisien agar kegiatan pembangunan akan menyediakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja untuk mengurangi masalah pengangguran.

Tabel 1. 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012-2017

Tahun	PDRB Juta Rupiah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2012	66.340.812,40	-1,54
2013	69.766.714,40	5,16
2014	73.372.963,80	5,17
2015	89.344.577,90	21,77
2016	94.548.205,90	5,82
2017	94.639.543,94	0,11

Sumber : BPS NTB (data diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi NTB dalam kurun waktu tahun 2012-2017 cenderung mengalami fluktuatif. Setelah mengalami minus pada tahun 2012 yaitu -1,54%. Laju pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2013 menjadi 5,16% dan terus naik menjadi 5,17% pada 2014. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2015 dimana laju pertumbuhan ekonomi NTB naik hampir 4 kali lipat menjadi 21,77%. Namun turun juga hampir 4 kali lipat menjadi 5,82% pada 2016. Kembali terjun bebas pada angka 0,11% pada tahun 2017. Kontraksi angka pertumbuhan ekonomi NTB disebabkan oleh tekanan kinerja pertambangan bijih/logam dan konsentrat.

PDRB tanpa petambangan biji besi dan konsentrat juga mengalami tren yang fluktuatif.

Namun, kenaikan pertumbuhan ekonomi yang dipercaya dapat menurunkan tingkat pengangguran akan menjadi semu apabila tidak dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia. Dalam tabel 1.1, jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi juga dengan investasi dalam bidang lain oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperbaiki kemampuan atau ketrampilan sumber daya manusia sebagai *human capital* seperti dalam bidang pendidikan.

Dengan investasi pada bidang pendidikan, akan menyebabkan sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin kompetitif dalam menghadapi berbagai tantangan dan membuka kesempatan atau probabilitas yang lebih besar untuk individu dalam mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Pengangguran mempunyai efek mengurangi pendapatan masyarakat yang akan mengurangi tingkat kemakmuran, ketika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh bisa terlaksana maka pendapatan masyarakat tinggi. Ketika tingkat kemakmuran turun maka akan menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran, keduanya berhubungan dengan mutu sumber daya manusianya.

Dengan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh dari laju pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinann di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini berjudul,

“ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012–2017” dengan studi kasus 8 kabupaten dan 2 kota yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2012-2017?
2. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2012-2017?
3. Bagaimana pengaruh angka partisipasi sekolah melalui usia 16-18 tahun dalam pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2012-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2012-2017.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2012-2017.

3. Untuk Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pendidikan melalui Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2012-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk lebih menambah wawasan peneliti tentang Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pendidikan melalui Angka Partisipasi Sekolah, dan Tingkat Kemiskinan di wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2012-2017.
2. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya kepada berbagai pihak yang membutuhkan, untuk penelitian berikutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas atau dikaji secara seksama.
3. Sebagai media informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui pembahasan tentang kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama dengan variabel independen laju pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan penangguran.
4. Masukan untuk Pemerintah dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat.